

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Oktober 2025/Khusus - Awal Menjabat)****Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI****UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NI NYOMAN SUKRENI**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **1035489**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/2 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 132.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF 125 TD Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA NC110A1CA/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N19M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 1S7 (JUPITER-MX) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOBIL, DAIHATSU F501RV TARUNA CX Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 5.000.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 1.137.000.000**



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.037.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.